# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah kabupaten kerinci khususnya Badan pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Kerinci merupakan pihak pertama Pengelolaan penyerahan aset ke kota Sungai Penuh.Aset Kabupaten Kerinci yang akan diserahkan kepada kota sungai penuh inftrastruktur sebanyak 40 Unit kantor kepala Dinas dan kepala Badan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak pernah mengangar alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan kabupaten Kerinci kepada DPRD kabupaten.

Aset merupakan sumber daya penting yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki setiap individu atau kelompok, organisasi yang idealnya direncakan dengan matang dan dapat diselaikan tepat waktu dalam penyerahan aset dan dinyatakan sukses. sebuah aset umumnya dinyatakan sukses ketika penyerahan aset selesai tepat waktu, sesuai, anggaran, sesuai dengan undang-undang dan aturan lainya, kepuasaan stekeholder (Gunduz.et al.,2013). Namun banyak dari penyerahan aset tersebut tidak selesai, sukses sampai pada batas waktu yang ditentukan. Hal ini menjadi masalah serius yang perlu diselesaiakan dengan niat baik dari semua pemangku kepentingan.

Keterlambatan atau tertunda penyelsaian penyerahan aset telah menjadi suatu penyakit yang menahun dalam pascapemekaran prov/kab, kota ini sanggat penting untuk menciptakan kesadaran akan sejauh mana keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi penyelesaian penyerahan aset.penyerahan aset banyak menjadi



UNIVERSITAS BUNG HATTA

masalah dengan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan (Alfakhari et al.,2018).

Unsur lokal organisasi yang terlibat dalam penyerahan aset Bupati, walikota, DPRD kab, Kota.para pihak yang terlibat tersebut tidak punya komitmen dengan sumber daya manusia yang tidak andal.maka terjadi keterlambatan dalam penyerahan aset pemerintah kabupaten kerinci ke kota sungai penuh.keterlambatan yang berakibat patal penyerahan aset tidak ada ketegasan dan aturan yang jelas dan tidak ada juga kepastian hukum yang berlaku. Dilema terjadi jika waktu sudah melebihi batas yang telah ditentukan tapi tidak ada kepastian hukum.dikarenakan ada unsur-unsur politik persiapan walikota mencalonkan diri sebagai Gubernur.

Masalah dan kendala yang terejadi pada penyerahan aset pemerintah kabupaten kerinci ke kota sungai penuh juga sudah dialami di provinsi dan kabupaten lainya yang ada diindonesia kuhsus nya kabupaten serang ke kota serang.Rumitnya penentuan ibu kota kabupaten yang baru, belum terselesainya sebagian pembebasan lahan masyarakat, tidak adanya tenaga ahli dalam penyerahan aset, adanya unsur politik, tidak adanya kepastian hukum yang jelas (Santoso et al.,2016).

Fenomena yang terjadi Indonesia penyerahan aset sanggat sering terjadi keterlambatan dalam penyerahan pascapemekaran. Keterlambatan terjadi disebabkan berbagai faktor.dari sekian banyaknya faktor penyebab keterlambatan yang sering menyebabkan keterlambatan penyerahan aset adalah dengan prubahan desain, produktifitas tenaga serta alat yang baru ( Kaming et al.,2014).

Banyaknya aset kabupaten yang terlambat dalam penyerahan aset pascapemekaran maka sudah barang tentu merupakan suatu masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya agar penyerahan dimasa mendatang tidak lagi terjadi keterlambatan yang menimbulkan dampak dan berkelanjutan bagi banyak pihak.Keterlambatan aset adalah fenomena umum dalam penyerahan aset, oleh karena itu penting untuk mempelajari dan menganalisis penyebab keterlambatan penyelesaian penyerahan aset ( aziz et al.,2016).

Penyerahan aset yang mengalami keterlambatan penyerahan pemerintah kabupaten kerinci ke kota sungai penuh berdampak pada tergangunya pelayanan publik dan kinerja pemerintah, dan menyebabkan besarnya biaya yang harus



UNIVERSITAS BUNG HATTA

dikeluarkan oleh pemerintah kota sungai penuh terutama penyewaan kantor dinas dan instansi kepada warga masayarakat yang punya Ruko di kota sungai penuh (wawancara dengan bapak Wakilwali kota Sungia Penuh).

Aset dapat diartikan sebagai semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang dibeli atas beban APBD dan APBN dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki dan dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah dan non departemen, badan-badan tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah.

Semenjak dimekarkan kabupaten kerinci menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten kerinci dan Kota otonom Sungai Penuh.banyak terjadi konflik menyangkut pengusaan terhadap aset-aset daerah yang berada dalam wilayah kota sungai penuh antara pemerintah kabupaten kerinci (Kabupaten induk) dan pemerintah kota sungai penuh (Kota Pemekaran).proses penyerahan aset daerah tidak berjalan sesuai dengan undang-undang, serta aturan lainya sehingga memicu terjadinya konflik (beda persepsi). Antara dua pemerintah daerah.yang menjadi isu utama dalam penyerahan aset pemerintah kabupaten kerinci ke kota sungai penuh adalah Kabupaten, Kota sungai Penuh, DPRD, Aset dan fasilitas.

Kontek konflik muncul ketika terjadi perbedaan persepsi terhadap undang-undang menyangkut pengusaan aset daerah yang berada dalam wilayah kota sungai penuh.aktor konflik aset daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten dan kota sungai penuh.disatu sisi kabupaten kerinci berusaha untuk menahan-nahan aset dan tidak mau menyerahkan seluruh aset daerah, sementara disisi lain kota sungai penuh menuntut agar aset daerah tersebut diserahkan seluruhnya kepada pemerintah kota sungai penuh sesuai undang-undang.

Fokus aset daerah yang di konflikan ini adalah berupa bangunan dan gedung-gedung perkantoran yang jumlahnya mencapai puluhan buah. konflik aset daerah ini telah berlangsung selama 11 tahun lamanya (2008-2020) wawancara dengan wakil walikota sungai penuh Bapak Zulhelmi, hingga kini belum juga terselesaikan. Banyak



UNIVERSITAS BUNG HATTA

sudah dinamika konflik yang dilalui,mulai dari surat-suratan, polimik di media cetak sampai kepada mobilisasi masa.selama itu pula,sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menyelesaiakan masalah konflik aset daerah tersebut,namun selalu gagal dan mengalami jalan buntu.konflik aset daerah tersebut juga berdampak terhadap kedua pemerintahan daerah.dampak tersebut dapat terlihat pada pelayanan publik (public services), pendapatan asli daerah (PAD),serta segregasi sosial .pemerintahpun tidak mampu menegakan hukum dalam menyelesaiakan masalah konflik asset daerah ini,karena pemerintah tidak tegas, sehingga konflik menjadi semakin rumit dan berlarut-larut.

Penelitian kualitatif terhadap sengketa aset antara kabupaten kerinci dan kota sungai penuh ini tidak memiliki tujuan untuk menguji relevansi sebuah teori, namun berupaya untuk menjadikan teori-teori yang ada sebelumnya sebagai kerangka acuan berpikir, seperti misalnya melihat konflik ini dalam perspektif politik predatory dimana kepentingan masyarakat dipertentangkan dengan kepentingan egoisme elit sebagai penguasa kabupaten dan kota. Maka penelitian ini tidak menekankan pada adanya suatu proses generalisasi suatu fenomena-fenomena yang serupa, melaikan lebih menitikberatkan pada pemaknaan dari suatu fenomena yang terjadi.Jenis penelitian ini adalah deskriptis analitis, sesuai dengan tjuan dalam penelitian ini yang hendak memberikan penjelasan mengenai kepentingan Bupati dan WaliKota sungai penuh dalam konflik sengketa aset yang terjadi pasca- pemekaran dalam kerangka itu, penelitian yang dilakukan dititikberatkan pada studi kepustakaan yang kemudian dibantu secara sanggat terbatas oleh wawancara.Berdasarkan masalah dan kendala diatas masih banyak lagi diduga permasalahan yang terjadi sehingga terlambatnya penyerahan aset daerah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.karena itu perlu diteliti permasalahan, keterlambatan penyerahan asset tersebut.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja masalah dan kendala yang dihadapi dalam penyerahan aset Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh?
2. Apa langkah/strategi yang dilakukan memfasilitasi/mempercepat penyerahan Aset ?



UNIVERSITAS BUNG HATTA

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menentukan masalah dan kendala dalam penyerahan aset Kab.Kerinci ke Kota Sungai Penuh.
2. Mengusulkan/mengembangkan mengurangi/mempercepat penyerahan aset kab.kerinci ke kota sungai penuh.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian difokuskan pada masalah/kendala penyerahan Aset dan fasilitas Berwujud fisik dari pemerintah kabupaten ke kota sungai penuh.
2. Aset yang akan diteliti difokuskan pada aset dan fasilitas Berwujud fisik ( Aset Fisik ) yang secara administratif dikelola oleh kabupaten kerinci.
3. Masalah kendala penyerahan aset difokuskan pada pihak yang terlibat langsung dalam penyerahan aset seperti Pemda Kab Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh, DPRD

## 1.5 Manfaat penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai informasi bagi pihak terkait dalam menentukan masalah penyerahan aset.
2. Dapat dijadikan dasar dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah penyerahan aset.
3. Sebagai bahan referensi dalam penyelesaian permasalahan penyerahan Aset.

## 1.6 Sistimatika penulisan

Memudahkan dalam penyelesaian tesis ini,penulis membagi penulisan penelitian ini atas beberapa bab dan sub bab. Adapun sistimatika penulis tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I : Pendahuluan**

Pada Bab I Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang dari kondisi permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian dan sistimatika penulisan.



UNIVERSITAS BUNG HATTA

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan dasar teori, literatur dan konsep yang dipakai hingga didapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian.

**BAB III : Metodologi Penelitian**

Pada Bab ini menjelaskan lokasi penelitian, metodologi atau tahapan yang dipakai dalam penelitian ini, data yang digunakan dan sistim yang dipakai dalam pengolahan data.

**BAB IV : Analisa Data Dan Pembahasan**

Melakukan analisis terhadap data-data dengan mengunakan diagram fishbone (sebab-akibat) dalam mencari akar masalah dan kendala hingga didapat solusi dan strategi penyelesaian.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Berisikan hasil dari penelitian, saran serta langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi kondisi dari suatu permasalahan dan upaya dalam pengambilan keputusan.